

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia dianggap sebagai titik sentral dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan di Indonesia secara keseluruhan dikendalikan oleh sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pembangunan manusia di negara Indonesia merupakan pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga dapat melaksanakan pembangunan itu sendiri (Adiutra et al, 2015). Ketika dalam suatu negara sumber daya manusia tersebut baik dan memiliki kualitas yang tinggi, maka negara tersebut pasti akan mengalami kemajuan. IPM atau disebut juga Human Development Index (HDI) merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (Badan Pusat Statistik (BPS), 2015).

Salah satu alternatif untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilakukan suatu negara terhadap pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1996 dalam

seri laporan tahunan yang diberi judul “Human Development Report” (Putra dan Ulupui, 2015). IPM dapat memberikan berbagai manfaat bagi suatu wilayah/negara. Sebagaimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2016), salah satu manfaat Indeks Pembangunan Manusia ini disusun adalah sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per kapita, UNDP mendefinisikan IPM sebagai “a process of enlarging people’s choice” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.

Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pembangunan Manusia di Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). IPM digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM dapat mengukur tingkat kesejahteraan baik dari sisi sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, indeks harapan hidup (longevity) dalam perhitungannya menggunakan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), serta indeks pendidikan atau pengetahuan (knowledge) dalam perhitungannya menggunakan data angka harapan lama

sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dari sisi ekonomi, indeks standar hidup layak (decent living) dalam perhitungannya menggunakan data nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Tabel 1.1

Perkembangan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kode	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2014	2015	2016	2017	2018
3200	JAWA BARAT	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30
3201	Bogor	67,36	67,77	68,32	69,13	69,69
3202	Sukabumi	64,07	64,44	65,13	65,49	66,05
3203	Cianjur	62,08	62,42	62,92	63,70	64,62
3204	Bandung	69,06	70,05	70,69	71,02	71,75
3205	Garut	62,23	63,21	63,64	64,52	65,42
3206	Tasikmalaya	62,79	63,17	63,57	64,14	65,00
3207	Ciamis	67,64	68,02	68,45	68,87	69,63
3208	Kuningan	66,63	67,19	67,51	67,78	68,55
3209	Cirebon	65,53	66,07	66,70	67,39	68,05
3210	Majalengka	64,07	64,75	65,25	65,92	66,72
3211	Sumedang	68,76	69,29	69,45	70,07	70,99
3212	Indramayu	63,55	64,36	64,78	65,58	66,36
3213	Subang	65,80	66,52	67,14	67,73	68,31
3214	Purwakarta	67,32	67,84	68,56	69,28	69,98

Lanjutan Tabel 1.1

Perkembangan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

3215	Karawang	67,08	67,66	68,19	69,17	69,89
3216	Bekasi	70,51	71,19	71,83	72,63	73,49
3217	Bandung Barat	64,27	65,23	65,81	66,63	67,46
3218	Pangandaran	65,29	65,62	65,79	66,60	67,44
3271	Kota Bogor	73,10	73,65	74,50	75,16	75,66
3272	Kota Sukabumi	71,19	71,84	72,33	73,03	73,55
3273	Kota Bandung	78,98	79,67	80,13	80,31	81,06
3274	Kota Cirebon	72,93	73,34	73,70	74,00	74,35
3275	Kota Bekasi	78,84	79,63	79,95	80,30	81,04
3276	Kota Depok	78,58	79,11	79,60	79,83	80,29
3277	Kota Cimahi	76,06	76,42	76,69	76,95	77,56
3278	Kota Tasikmalaya	69,04	69,99	70,58	71,51	72,03
3279	Kota Banjar	68,34	69,31	70,09	70,79	71,25

Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Barat tahun 2018

Dilihat pada tabel 1.1, nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2018, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 71,30. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 yang sebesar 70,69. Pada tahun 2018, pembangunan manusia di Jawa Barat masih berstatus “tinggi”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2017. IPM Provinsi Jawa Barat

pada tahun 2018 tumbuh sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 2017. terdapat kenaikan nilai IPM pada setiap Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM tertinggi pada Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung yang dapat kita lihat memiliki nilai sebesar 81,06 pada tahun 2018 dan dari data tersebut Kota Bandung juga mengalami kenaikan nilai IPM dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM terendah adalah Cianjur dengan nilai IPM pada tahun 2018 sebesar 64,62 namun demikian nilai ini terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Nilai IPM suatu wilayah yang masuk dalam kategori rendah, menengah maupun dalam kategori tinggi, hal ini masih perlu untuk di perhatikan oleh pemerintahannya. Nilai IPM kategori rendah masih sangat di perlukan perhatian khusus agar suatu daerah dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya. Nilai IPM kategori menengah dalam hal ini masih perlu adanya optimalisasi. Begitu juga dengan suatu daerah yang memiliki kategori nilai IPM dalam kategori tinggi yang dalam hal ini harus tetap terus di tingkatkan dan di pertahankan agar masyarakat makin produktif agar masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dilihat pada angka harapan hidup.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut (Anggatia Ariza, 2016). Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1). Faktor yang diperhatikan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB), atau istilah internasionalnya adalah Gross Domestic Product (GDP). Gross Domestic Produk atau Produk Domestik Bruto adalah total produksi

barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu, di satu negara/wilayah tertentu. Nilai PDB diukur dengan cara total nilai dari berbagai barang dan jasa di agregasikan/di rata-ratakan nilainya. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhatikan jenis barang dan jasanya juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza (2016) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviatamara (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Selain Pertumbuhan Ekonomi, indikator penting perkembangan perekonomian daerah adalah Distribusi Pendapatan. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang baik. Pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan menggunakan angka koefisien gini. Angka koefisien gini pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, sehingga peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat tersebut belum dapat hidup secara layak sebagaimana mestinya, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 2014). Partisipasi dari kalangan swasta juga sangat

penting dalam menciptakan nilai tambah bagi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, mengumpulkan angka mendukung serta mendorong kreativitas dan inovasi. Kekuatan fiskal yang berasal dari dana DIPA, transfer dana ke daerah dan dana desa uang besar ini seharusnya menjadi stimulus dalam proses pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2017) membuktikan bahwa Distribusi Pendapatan memberikan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meydiasari (2017) menyatakan bahwa Distribusi Pendapatan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Pemanfaatan belanja daerah dialokasikan untuk hal-hal produktif yang mendukung aktivitas pembangunan. Dengan kata lain, belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik (Khusnul,2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan

daerah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suyanto (2009:74), dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Mardiasmo (2002:47), semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik.

Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, yang mendukung aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas aset. Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD).

Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsi belanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza (2016) membuktikan bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyatari (2017) menyatakan bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza (2016) yang menguji tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat. Alasan mengacu pada penelitian sebelumnya adalah untuk menggali data empiris dengan membuktikan kebenaran hipotesis yang telah disusun pada penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Pada tahun penelitian, dimana pada penelittian terdahulu menggunakan data tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2016-2018.

2. Pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat didasari karena IPM Indonesia dan Jabar dari tahun ke tahun terus meningkat. Tapi sebagai data agregat, tentunya ada data mikro dan simpangan yang mungkin tidak terpotret. IPM meningkat tapi masalah kesejahteraan sosial juga meningkat, angka harapan hidup meningkat tapi gizi buruk masih tinggi, masalah kesejahteraan sosial meningkat. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah daerah (Gubernur Jabar) perlu menindaklanjutinya.
3. Pada variabel penelitian, di mana di penelitian ini peneliti menambahkan variabel Distribusi Pendapatan, untuk diuji pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pemilihan variabel ini karena diketahui distribusi pendapatan merupakan variabel penting yang menjelaskan kekuatan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat, sehingga tujuan dari organisasi publik sebagai penyedia layanan masyarakat yang baik dapat tercapai.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat tahun 2016-2018.”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan diatas,maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Distribusi Pendapatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

C. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, spesifik dan mendalam, maka peneliti memandang masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabel dan periode penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini dibatasi pada data Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Belanja Modal yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tahun 2016-2018.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
- b. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Distribusi Pendapatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

- c. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
- b. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini akan mampu berkontribusi terhadap efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan atau referensi dalam efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
- d. Bagi calon peneliti, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang dan diharapkan bagi calon peneliti bisa mengembangkan baik dari jumlah variabel ataupun kerangka pemikirannya.